Nama : Reza Ananda

Nim : 10200120231

Kelas : HTN F

Resume Jurnal

Judul : Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan : Upaya Mewujudkan Otonomi Daerah di Bidang Politik

Pendahuluan :

Selama tiga puluh dua tahun berada di bawah rezim orde baru, Indonesia mengalami apa yang disebut oleh Karl D. Jason sebagai bureaucratic politic (politik birokrasi), yaitu suatu keadaan politik yang menempatkan negara pada kedudukan sangat dominan. Pada era ini, kekuasaan dalam pembuatan keputusan didominasi para penguasa, terutama para perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi.

Keadaan demikian dalam teori korporatisme sebagaimana pernah ditulis oleh Moh. Mahfud MD, negara dipandang sebagai suatu organ yang mempunyai kemauanan kepentingan sendiri yang dapat melakukan campur tangan dalam kehidupan masyarakatnya. Kerangka berfikir demikianlah ternyata yang menjadi pandangan penguasa orde baru. Kerangka berfikir tersebut dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa stabilitas politik adalah kunci utama dalam mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, terutama untuk memulai pertumbuhan ekonomi dengan cepat.

Setelah reformasi bergulir yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, dilakukan berbagai ikhtiar perbaikan bangsa. Salah satu ikhtiar ketatanegaraan yang dilakukan adalah dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sejak 1998 hingga 2001, terdapat empat kali amandemen terhadap UUD 1945.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah tersebut, setiap daerah memiliki kekuasaan dalam berbagai bidang, kecuali yang menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Kekuasaan pemerintah pusat tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu meliputi kekuasaan dalam bidang : a. politik luar negeri b. Pertahanan; c. Keamanan; d. Peradilan. e. Moneter dan fiskal, dan f. Agama.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 di atas, maka salah satu otonomi yang dimiliki daerah ialah otonomi dalam bidang politik. Ikhtiar untuk mewujudkan otonomi di bidang politik tersebut dilakukan dengan

memberi pengaturan baru tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, termasuk pengaturan tentang mekanisme pemilihan Anggota Legislatif, seperti DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan DPD yang lebih mendekatkan pemilih dengan calon yang merupakan wakil dari daerahnya.

Dua mekanisme rekrutmen kepemimpinan daerah di atas secara simbolik menggambarkan telah hadirnya otonomi di bidang politik, karena dipilih langsung oleh penduduk daerah setempat. Otonomi politik itu sesungguhnya belum terwujud, sebab masih terbukanya kemungkinan pintu campur tangan terhadap otonomi politik di daerah oleh pusat. Campur tangan itu hadir seiring dengan masih diterapkannya sistem kepartaian yang bersifat nasional. Akibatnya, partai politik di tingkat nasional sering mengintervensi partai-partai politik di daerah dalam dua mekanisme pemilihan tadi.

Hal inilah yang memunculkan gagasan untuk membentuk partai politik lokal di setiap daerah, selain terdapat beberapa alasan lain yang relevan dikemukakan dalam rangka mendukung gagasan pembentukan partai politik lokal ini, seperti adanya pengalaman historis bangsa ini pada 1955. Partai politik lokal pernah diperkenankan dan mengikuti pemilihan umum pada tahun itu.

Pada masa mendatang, gagasan mengenai pembentukan partai politik lokal di Indonesia sebagai konsekuensi dilaksanakannya otonomi daerah merupakan hal yang perlu dipersiapkan sejak awal secara akademik. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis akademik terhadap dua hal. Pertama, kemungkinan lahirnya partai politik lokal di Indonesia. Kedua, bagaimana konsep dasar partai politik lokal tersebut jika diimplementasikan dalam negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah, Pertama: apa urgensi melahirkan partai politik lokal di Indonesia yang berbentuk negara kesatuan? Kedua, bagaimanakah konsep partai politik lokal yang relevan diterapkan di Indonesia sebagai negara kesatuan?

Metode Penelitian

Dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari dan menganalisis secara cermat terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder di atas. Dalam tulisan ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini dimulai dengan data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum untuk mendukung tulisan ini.

Pembahasan

Konsep Dasar Federalisme

Menurut Preston King, bentuk negara federal dalam konsepnya sering dipertentangkan dengan teori kedaulatan. Teori kedaulatan sendiri dipopulerkan oleh Jean Bodin, Thomas Hobbes, Spinoza dan Austin. Bagi para penggagas konsep kedaulatan, ia adalah sesuatu yang bersifat asli, tertinggi dan tidak dapat dibagi-bagi. Dalam konteks hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah, kedaulatan hendaknya tidak terbagi-bagi, baik ia berada pada pemerintahan pusat, maupun daerah. Disinilah kritik terhadap konsep federal timbul oleh banyak kalangan.

Prodont, seorang pakar politik dari Perancis adalah orang yang pertama mengemukakan konsep federal ini. Secara teoritis, istilah yang berhubungan dengan federalisme biasanya disebutkan dalam dua istilah, yaitu federalisme itu sendiri dan federal (federation). Friderich mengartikan federalisme sebagai satu kesatuan yang tetap menghargai perbedaan dalam kesatuan itu. Ia menyatakan: "Federalism as a union groups, united by one or more common objectives, but retaining their distinctive group character for other purposes".

Bagi para pengikut pandangan federalisme ideologis, istilah federalisme ialah merujuk pada bentuk federalisme sebagai sebuah ideologi. Ia merupakan sesuatu yang dikonstruksikan sebagai sebuah doktrin. Alexander Marc mengatakan bahwa "federalism became a doctrine" pada abad kesembilan belas. Bahkan P.J. Prodount sebagai peletak dasar teori-teori tentang federal menyatakan "truth is one" (percaya pada idea persekutuan ini)". Kata truth menurut King diartikan Proudont bertujuan menjadikan gagasannya tentang federalisme dapat dijadikan sebagai satu-satunya doktrin dan kemudian dapat dirumuskan dalam Konstitusi-Konstitusi di pelbagai negara.

Bagi Prodont, gagasan tentang federalisme yang ditawarkannya masa itu lebih diartikan sebagai nilai-nilai federalisme yang berisi pentingnya penghargaan terhadap daerah-daerah oleh pemerintah pusat. Prodont sebagai penemu teori federalisme tidak menyebut bahwa federalisme mesti dilakukan dengan membentuk negara federal. Ia mengatakan "the sole constitution which an astringent reason will compel the peoples of the world to adopt is federalism".

Ajaran Federalisme di Negara Kesatuan

Secara teoritis, terdapat perbedaan antara devolusi kekuasaan dengan pembagian kekuasaan dalam negara federal. Pembagian kekuasaan dalam negara federal dicirikan dengan adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur

secara tegas dalam Konstitusi. Devolusi kekuasaan memberikan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah melalui kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Sejarah berlakunya devolusi kekuasaan di Inggris dimulai dengan adanya konflik antara pemerintah pusat Inggris dan beberapa daerah, seperti Scotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Daerah-daerah tersebut merasa memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dibanding kebanyakan daerah di Inggris lainnya. Perbedaan itulah yang dijadikan alasan untuk memisahkan diri dari Inggris.

Dalam konteks implementasi devolusi kekuasaan di Inggris, terdapat perbedaan mendasar antara istilah devolusi legislatif dan eksekutif. Devolusi kekuasaan legislatif dimaknai sebagai kekuasaan yang dimiliki pemerintah daerah (provinsi, region) untuk membuat peraturan perundang-undangan di daerah setempat. Dalam devolusi legislatif, Dewan Rakyat yang dipilih memiliki kekuasaan untuk membuat sendiri peraturan yang berkaitan dengan daerahnya. Sedangkan dalam devolusi eksekutif secara relatif kekuasaan yang dimiliki lemah, di mana kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan masih berada di Parlemen Nasional Inggris yang populer disebut sebagai Westminster.

Praktek lain teori dari federalisme ideologis di negara kesatuan adalah adanya kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan atas, otonomi di Indonesia melahirkan ambiguitas bentuk negara dalam kaitan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah oleh sebagian pihak.

Konsep Dasar Partai Politik Lokal untuk Indonesia

Selain adanya landasan teoritikal berupa federalisme ideologis yang diserap Indonesia pasca otonomi daerah, alasan lain dari perspektif hukum tata negara yang dapat dijadikan dasar ide pembentukan partai politik lokal ini ialah adanya pertentangan antara pengaturan dalam beberapa UU terkait sebagaimana disinggung dalam pendahuluan tulisan ini.

Pertentangan tersebut dapat dilihat dari perbedaan substansi pengaturan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang mensyaratkan Partai Politik bersifat nasional dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan adanya otonomi politik bagi daerah.

Partai Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Berdasarkan ketentuan terkait kewenangan provinsi, kabupaten/kota dalam UU No. 32 Tahun 2004, kedudukan provinsi dalam struktur pemerintahan mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi, mengawasi dan membina pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya. Dalam konteks kewenangan otonomi itu, pemerintahan provinsi juga mempunyai kewenangan untuk menangani pelbagai urusan yang berkaitan dengan urusan lintas kabupaten/kota. Berdasarkan hal itulah, konsep partai politik lokal kedepan akan lebih efektif jika diletakkan di provinsi.

Adapun partai-partai yang ada di kabupaten/kota merupakan cabang dari partai yang berpusat di provinsi tersebut. Hal ini dibuat agar, partai-partai di kabupaten/kota yang akan menempatkannya pada institusi legislatif dan eksekutif di kabupaten/kota dapat dimonitor oleh partai pusatnya di provinsi dan dapat menjalankan urusan otonomi secara selaras.

Partai Politik Lokal, Partai Politik Nasional, dan Pemilu

Secara yuridis ketatanegaraan, sesungguhnya telah terjadi pemisahan antar partai politik lokal dan partai politik nasional dalam konteks hak dan kewajiban yang mereka lakukan dalam beberapa hal, Pertama, dalam hal mengajukan calon anggota parlemen (DPR/DPRD) dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 2 Tahun 2008. Kedua, dalam konteks pengawasan terhadap anggota DPR/D juga terdapat pemisahan kewenangan antara keduanya sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya dalam hal pemecatan anggota DPR/D dimaksud melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Selain dua hal itu, hal yang ketiga ialah kewenangan partai untuk memberhentikan Ketua DPR/D yang berasal dari partainya.

Berdasarkan konstruksi hubungan antara partai politik di tingkat pusat dengan partai politik di daerah sekarang ini, maka konsep partai politik lokal ke depan hendaknya mempertegas pemisahan kewenangan yang sudah ada dalam pelbagai peraturan perundang-undangan tersebut.

Kedudukan cabang-cabang partai nasional di tingkat provinsi dan kabupaten berfungsi untuk mensosialisasikan pelbagai program kerja partai nasional ke berbagai lapisan masyarakat di daerah. Khusus terkait Pemilu, cabang-cabang partai nasional di tingkat daerah ini sangat memegang peranan penting untuk melakukan kampanye sampai ke lapisan paling bawah. Di antara kedua cabang partai itu tidak akan terjadi tumpang tindih peranan, sebab mereka dari awal telah didesain dengan peran dan lahan garap berbeda.

Relasi antar Partai Politik Lokal Permasalahan lain yang mesti dibahas dalam desain partai politik lokal ini ialah hubungan antara partai politik lokal yang satu dengan yang lainnya.

Hubungan itu sangat mungkin terjadi dalam dua bentuk yaitu, hubungan positif dan negatif. Dalam konteks yang positif, hubungan antara partai politik lokal dapat hadir pada saat mereka membentuk koalisi. Sedangkan dalam konteks yang negatif, hubungan keduanya dapat saja berupa perselisihan yang secara yuridis mesti dicari jalan keluarnya.